

Judul : Soal ambruknya pondok pesantren Al Khoziny, tuntaskan investigasi, temukan kelalaian
Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal Ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny

Tuntaskan Investigasi, Temukan Kelalaian

SENAYAN menyoroti rencana Pemerintah memperbaiki bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Pemerintah fokus melakukan investigasi terlebih dulu atas ambruknya Musala di Ponpes Al Khoziny sebelum menggelontorkan uang APBN.

Langkah tersebut dilakukan agar ke depannya kejadian tersebut tidak terulang kembali. "Banyak ponpes yang dibangun menggunakan APBN. Tapi penggunaannya dalam perbaikan Ponpes Al Khoziny mesti dikaji ulang," saran Lasarus di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Diketahui, usulan pembangunan kembali gedung di Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN pertama kali dicetuskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Dia mengatakan masih menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun gedung ponpes dari awal itu.

"Kalau soal anggaran, *insya Allah* cukup. *Insya Allah* dari APBN, tapi tidak menutup ke-

mungkinan juga ada bantuan dari swasta" ujar Dody di Kantor Kementerian PU Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Investigasi yang dilakukan, lanjut Lasarus, berkaitan dengan dugaan kelalaian atas pembanguan musala tersebut. Masalah ini harus diproses terlebih dahulu. "Perlu dikaji ulang dan diselidiki dulu kejadian ini. Masalahnya apa, sebabnya di mana. Itu aja belum diungkap," kata politikus PDIP ini.

Terlebih, kata dia, tragedi ambruknya Musala di Ponpes Al Khoziny telah menewaskan 67 santri. Maka, Pemerintah perlu mendengar aspirasi dari para keluarga korban. "Kalau kelalaian seperti ini, tiba-tiba negara yang mengambil alih, terus persoalan robohnya Ponpes ini prosesnya seperti apa?" ucapnya.

Lasarus menegaskan, tak ada masalah dalam pembangunan ponpes menggunakan APBN. Tapi tidak dalam kasus Ponpes Al Khoziny karena tak mau ada kesan negatif dalam penggunaan uang negara. "Sudahlah roboh pun tidak apa-apa, nanti juga negara bangun seperti yang ini misalnya. Ini contoh yang tidak baik," tuturnya.

Senada, anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menilai,



Lasarus

rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny menggunakan APBN harus dikaji secara hati-hati. Sebab, masih banyak kebutuhan masyarakat lain belum mendapat perlakuan yang sama.

"Wacana penggunaan APBN untuk membangun ulang ponpes belum menjadi keputusan final, masih harus dikaji secara kesian lembaga yang lalai justru dibantu," kata Atalia dalam keterangannya, Sabtu (11/10/2025).

Menurut Atalia, mekanisme penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menelan

banyak korban harus jelas. Aspek keadilan bagi masyarakat harus diperhatikan.

Dia menyebut ada dua hal penting yang harus berjalan beriringan. Pertama, proses hukum harus ditegakkan dengan serius. Bila memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. "Keadilan bagi korban lebih utama," tegas politikus Golkar ini.

Kedua, lanjut dia, negara memang punya kewajiban melindungi santri dan keberlangsungan pendidikan keagamaan. Namun, bukan hanya di Ponpes Al Khoziny karena masih ada ribuan pesantren dan lembaga pendidikan agama lain yang bangunannya sudah tua yang juga berisiko mengancam keselamatan peserta didik maupun pengajar. "Jadi, usulan penggunaan APBN itu harus dikaji ulang dengan sangat serius," tegasnya.

Bagaimana tanggapan Pemerintah? Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan investigasi atas penyebab dari robohnya bangunan musala di Ponpes Al Khoziny. Karenanya, pihaknya belum melakukan pendalaman atas kerusakan dan

kebutuhan perbaikan.

"Kami belum bisa memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Proses yang harus dilalui masih panjang sebelum akhirnya perbaikan bisa dilakukan," kata Dody di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kementerian PU memiliki sejumlah anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung perbaikan ponpes tersebut. Salah satunya adalah dana pendidikan yang juga digunakan untuk revitalisasi sekolah. "Itu bisa untuk pendidikan Islam dan non-Islam. Yang Islam itu nanti bisa untuk ponpes atau tempat lain," jelasnya.

Namun, ia belum bisa memastikan apakah nantinya perbaikan ponpes akan dilakukan langsung oleh Kementerian PU. Sehingga pihaknya terus melakukan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Ponpes Al Khoziny.

"Kami juga sedang mengecek kualitas bangunan, apakah standar, punya izin atau tidak. Belum bicara soal (perbaikan ponpes) dulu, nanti dilihat kesesuaian bangunan dulu dengan izin seluruh ponpes," pungkas Dody. ■ TIF